
PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM PASCA REVITALISASI KAWASAN EKS LOKALISASI DOLLY- JARAK

Fridz Ezza Abigail

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the role of the Government of Surabaya City in the empowerment of UMKM after the revitalization of the former area of Dolly-distance localization in Kelurahan Putat Jaya, Sawahan Sub-district, Surabaya City. After the closing of the localization of Dolly-Distance, the Government of Surabaya City to empower UMKM to change the area of localization Dolly-Distance to be better.

Keywords: Government Role, Empowerment, UMKM, Ex Localization Dolly-Jarak

Pendahuluan

Masalah prostitusi di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Aktivitas prostitusi mempunyai sejarah panjang didalam masyarakat Indonesia, mulai dari keberadaan para selir untuk para laki-laki bangsawan, para Nyai bumiputra untuk para pejabat VOC, para perempuan penghibur untuk para kuli kereta api serta perekebunan pada masa Hindia Belanda, serta pemaksaan pemerintah penjajah Jepang pada perempuan bumiputra untuk menjadi perempuan penghibur bagi tentara militer Jepang. Di hampir setiap kota besar Indonesia terdapat daerah lokalisasi pelacuran, yaitu Sunan Kuning dan Gambilangu di Semarang, Dolly di Surabaya, Pasar Kembang di Yogyakarta dan Saritem di Bandung.

Di Kota Surabaya sendiri sangat terkenal dengan lokalisasi Gang Dolly. Pada tahun 1967, Dolly Khavit seorang perempuan bekas PSK membuka usaha pelacuran dan membangun wisma Barbara. Setelah itu, muncul wisma lain dan akhirnya di awal tahun 1970-an perkampungan itu berubah nama menjadi Gang Dolly. Semakin lama Gang Dolly semakin dikenal masyarakat. Kondisi tersebut menjelma menjadi kekuatan dan sandaran hidup bagi penduduk disana. Dolly kemudian mendapat predikat sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.

Kini, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah provinsi Jawa Timur berniat untuk merelokasi Lokalisasi Gang Dolly menjadi pusat perdagangan. Penutupan Dolly bukanlah keputusan yang dibuat dalam waktu cepat. Pemerintah Kota Surabaya didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur, gencar melakukan kampanye menghapus julukan Kota Surabaya yang tenar sebagai "Kota Sejuta PSK" dalam tiga tahun terakhir (2011-2014). Program

pemberdayaan masyarakat pun diturunkan agar para PSK tidak beroperasi, diantaranya dengan membekali kemampuan usaha dan bekal Rp 3juta per PSK untuk membuka usaha baru dikampung halamannya. Upaya tersebut berhasil dan mampu menurunkan jumlah PSK. Di dua kompleks lokalisasi Dolly-Jarak, hingga mei 2012 tercatat sebanyak 1.080 PSK. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.132 PSK. Dalam rangka melakukan penutupan, Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Rp 16 miliar untuk membeli seluruh wisma yang ada.

Pada Tanggal 18 Juni 2014, Gang Dolly sudah ditutup secara resmi oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini dan aparatnya. Dengan adanya kebijakan revitalisasi kawasan eks gang dolly, pemberdayaan masyarakat pun dilakukan untuk mengubah kawasan eks gang dolly sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka proses pembangunan ke depan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah tugas yang diemban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberi dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi potensinya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya pemberdayaan dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejolak-gejolak sosial tersebut. Dalam konteks ini penting sekali untuk menekankan kepada masyarakat bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara

mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk UMKM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 18 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan yang menyatakan “ Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya “. Dengan adanya kebijakan Revitalisasi dari Pemerintah Kota Surabaya yang ditujukan kepada kawasan eks gang dolly maka masyarakat eks gang dolly pun harus ikut berpartisipasi untuk merubah kawasan eks gang dolly.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah memutuskan, semua lokalisasi di Kota Pahlawan, termasuk Gang Dolly dan Jarak, menyalahi Perda Nomor 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila. Tak hanya itu, Wali Kota juga ingin mengajak warganya untuk mencari rizki halal. Untuk itu, Ibu Risma berusaha mengangkat warga yang terdampak dengan memberdayakannya sesuai skil mereka masing-masing.

Kerangka Teori

UMKM

Menurut Winarni, UMKM adalah usaha yang apabila dilihat melalui ciri-ciri yang melekat pada UMKM tersebut, maka akan didapat ciri-ciri sebagai berikut:

- terdapat ikatan emosional yang kuat antara perusahaan dengan pemilik, sehingga terjadi suatu kepedulian yang amat tinggi dari pemilik kepada perusahaannya. Mengakibatkan seluruh kewajiban perusahaan menjadi kewajiba pemilik juga
- sumber daya manusia yang tersedia terbatas
- modal usaha berasal dari kepemilikan pribadi
- pemilik sering mencampur adukan antara kepemilikan keuangan dari perusahaan dengan milik pribadi

- susunan organisasi yang masih sederhana, tidak terdapat system pembagian kerja yang baku
- biasanya usaha tersebut belum berbadan hokum, masih usaha perorangan
- kualitas dari manajemen dari organisasi cukup rendah, lebih mengedepankan sisi kekeluargaan, sehingga sering tidak terdapat rencana usaha yang mumpuni

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan

Sebelum membahas mengenai pemberdayaan UMKM, terlebih dulu akan dijelaskan mengenai konsep pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “*empowerment*” yang mana, secara harfiah memiliki arti sebagai “pemberkuasaan”, yakni pemberian serta peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage*). Seperti yang telah diungkapkan oleh Jim Iff yakni *empowerment aims to incrase the power of disadvantage*. Sulistiyani menjelaskan mengenai pemberdayaan secara emitologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “*daya*” yang^T berarti kekuatan atau kemampuan, berdasarkan dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang yang kurang atau belum berdaya.

S

Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat^M dalam Sulistiyani pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi;

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada kemandirian.

Peran Pemerintah

Menurut Gede Diva (2009), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM.
2. Peran pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif.
3. Peran pemerintah sebagai katalisator
Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud

memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Pembahasan

Tahapan Penyadaran T

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sudah melakukan penyadaran kepada para warga terdampak yang berminat dengan UMKM *fashion dan garment* yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Pada awalnya Disperdagin Kota Surabaya bersinergi dengan Kecamatan dan Kelurahan Putat Jaya untuk dapat mengumpulkan atau menampung warga terdampak yang berminat dengan *fashion dan garment*. Setelah warga terdampak yang berminat dengan kerajinan tersebut terkumpul, maka dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya mengumpulkan warga-warga tersebut di balai-balai RT meraka masing-masing. Dengan dikumpulkannya warga terdampak yang berminat dengan UMKM *fashion dan garment* di balai^PRT, Disperdagin pun memberikan penyadaran tentang pemberdayaan UMKM berupa *fashion dan garment*. Dan setelah penyadaran berlangsung secara kondusif Disperdagin pun akan memberikan pelatihan kepada warga yang berminat. Seperti yang disampaikan oleh Sudomingrat dalam Sulistiyani, Tahapan yang pertama atau penyadaran merupakan tahapan yang dilakukan pertama kali. Pada tahapan penyadaran merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jadi penyadaran sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum para warga diberikan pelatihan dan bahkan diberangkatkan ke luar

kota. Setelah ditutupnya eks lokalisasi Dolly-Jarak Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam untuk membantu para warga yang terdampak. Para warga yang terdampak itu justru ditampung dan dikumpulkan untuk disadarkan tentang pemberdayaan UMKM di Dolly-Jarak sesuai dengan minat mereka.

Tahapan Transformasi Kemampuan

Banyaknya informan menyatakan telah mendapatkan wawasan pengetahuan keterampilan tentang kerajinan yang menjadi minat para pelaku-pelaku UMKM tersebut. Tahap transformasi kemampuan ini menciptakan para pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya jadi lebih terampil dalam kerajinan sepatu dan batik. Setelah tahap penyadaran berjalan dengan kondusif dan adanya minat dari warga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan tahapan transformasi kemampuan dengan cara memberikan pelatihan kepada warga. Pelatihan pun diberikan dan bahkan warga juga diberangkatkan pelatihan di luar kota dan ada juga yang diikutkan magang untuk menambah wawasan warga terdampak. Dengan wawasan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill para pelaku UMKM yang sebelumnya hanya memiliki skill seadanya dan tidak tahu caranya berproduksi. Sesuai dengan yang disampaikan Sumodiningrat dalam Sulistiyani, tahapan transformasi kemampuan merupakan proses belajar tentang pengetahuan dan menguasai keterampilan yang mereka butuhkan. Dengan adanya transformasi kemampuan ini dapat merubah *mindset* orang bahwa dengan di tutupnya eks lokalisasi Dolly-Jarak ada tujuan dan manfaatnya. Tidak hanya sekedar ditutup tetapi juga untuk membantu warga terdampak meningkatkan taraf hidup dengan melakukan kegiatan UMKM yang menjadi program Disperdagin Kota Surabaya.

Tahapan Pengayaan

Tahapan pengayaan ini berjalan dengan baik. Menurut Sumodiningrat dalam Sulistiyani, pada tahap pengayaan merupakan peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi. Para pelaku UMKM yang sebelumnya mendapatkan wawasan pengetahuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, sekarang dapat melakukan inovasi dan kreasi-kreasi terbaru yang menjadi unggulan produk mereka. Dengan mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan skill atau keterampilan membuat sepatu dan membuat . Tetapi pada tahap ini para pelaku UMKM yang tergabung dalam binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak dapat secara langsung mengeluarkan inovasi dan kreasi-kreasi terbaru secara langsung. Para pelaku UMKM ini dapat melakukan inovasi tersebut secara perlahan atau bertahap. Yang sebelumnya bukan menjadi bidang mereka dan sekarang pun mulai perlahan-lahan dapat menghasilkan produk yang unggulan. Dengan keberhasilannya para warga terdampak yang menjadi pelaku-pelaku UMKM saat ini untuk melakukan inovasi dan kreasi kreasi terbaru, maka Pemerintah Kota Surabaya tinggal melakukan perannya saja.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sudah memberikan fasilitas yang sesuai dengan bidang para pelaku UMKM. Disperdagin Kota Surabaya memfasilitasi program pemberdayaan UMKM Dolly-Jarak yang menjadi binaan Disperdagin. Pada tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan dan tahap pengayaan, Disperdagin memfasilitasi semuanya dengan cara memberikan pelatihan yang sampai ke luar

kota. Tidak hanya itu Disperdagin pun memberikan magang untuk wawasan para warga terdampak bertambah dan menjadikan UMKM dengan produk unggulannya. Para warga terdampak yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku UMKM binaan Disperdagin Kota Surabaya diberikan tempat untuk memproduksi dan alat-alat yang sesuai dengan keterampilan mereka. Tempat memproduksi, alat-alat dan fasilitas lainnya seperti listrik, air dll. Para warga terdampak tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan Dinas Perdagangan pun akan menambahkan fasilitas berupa alat-alat untuk membuat sepatu atau sandal dikarenakan banyaknya pesanan yang diterima oleh KUB Mampu Jaya itu sendiri. Sedangkan untuk Rumah Kreatif Batik sengaja dibuat untuk mereka yang ingin belajar dan sekaligus memproduksi batik. Dan fasilitas yang diberikan pun sudah semua bahkan menurut para pelaku-pelaku UMKM dibawah naungan Dinas Perdagangan sudah berperan besar dalam memfasilitasi UMKM tersebut.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator yang dibuat untuk para pelaku-pelaku UMKM di Dolly-Jarak sangat membantu dalam perkembangan UMKM tersebut. Menurut Gede Diva, pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan dapat membantu warga yang terdampak lebih berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan menurut para pelaku-pelaku UMKM tersebut regulator yang dibuat tidak menyusahkan para pelaku UMKM. Mereka bahkan diberi kebebasan dalam berusaha asalkan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai minat dan bakat mereka. Dan dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa tujuan didirikannya UMKM-UMKM di Dolly-Jarak untuk menciptakan ikon baru. Bahwa Dolly yang sekarang bukan lagi tempat-tempat untuk melakukan

asusila, melainkan menjadi tempat yang dapat dikunjungi karena UMKM nya.

Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sudah berupaya untuk memajukan atau mempercepat proses perkembangan UMKM. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Gede Diva, sebagai katalisator pemerintah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise* yang merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan akan melakukan transformasi ke usaha besar. Untuk mempercepat proses tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menyiapkan sentra-sentra yang tersebar di Kota Surabaya untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM Dolly yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Disperdagin pun mengirim surat yang melalui Ibu Rhisma untuk mengenalkan produk-produk unggulan kepada seluruh hotel di Surabaya, bahwa UMKM Dolly-Jarak ini mempunyai produk unggulan yang berkualitas. Bahkan jika ada pameran-pameran UMKM kedua kelompok UMKM tersebut di ikut sertakan agar produk mereka dapat diketahui banyak orang dan diminati. Tidak hanya se Kota Surabaya bahkan dapat sampai diminati sekala nasional bahkan sampai *go international*. Dengan begitu para pelaku-pelaku UMKM dapat terus berusaha dan berkarya menjadi usaha besar. Dan dapat menarik para warga terdampak lainnya untuk mau berusaha dan membawa UMKM Dolly lebih maju lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai fakta yang didapatkan oleh peneliti dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai penyajian data, analisis data kemudian interpretasi teoritik, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Tahapan-tahapan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam memberdayakan UMKM pasca revitalisasi

kawasan eks lokalisasi Dolly-Jarak yakni sebagaimana berikut:

- Tahapan Penyadaran: Pada tahap ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya bersinergi dengan Kecamatan Sawahan untuk melakukan penyadaran kepada warga terdampak, dengan mencari warga yang berminat dengan UMKM *fashion dan garment* yang menjadi binaan Disperdagin Kota Surabaya.
 - Tahapan Transformasi Kemampuan: Pada tahap ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memberikan wawasan pengetahuan agar meningkatkan keterampilan dalam memproduksi sepatu dan batik untuk dijadikan produk unggulan.
 - Tahapan Pengayaan: Pada tahap ini, para pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dapat melakukan inovasi dan kreasi-kreasi sesuai dengan keterampilan mereka. Tetapi dalam melakukan inovasi dan kreasi-kreasi terbaru, para pelaku UMKM melakukannya secara bertahap dan tidak bisa secara langsung.
2. Peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang tergabung dalam kelompok UMKM binaan yang berupa *fashion dan garment* pasca revitalisasi kawasan eks lokalisasi Dolly-Jarak di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yakni sebagaimana berikut ini:
- Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator: Sebagai fasilitator Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya sudah memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang menjadi binaan UMKM berupa *fashion dan garment*. Fasilitas yang diberikan dari awal melakukan tahapan penyadaran, tahapan transformasi kemampuan dan tahapan pengayaan.
 - Peran Pemerintah Sebagai Regulator: Sebagai regulator Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan kebijakan yang menyusahkan atau memberatkan para pelaku UMKM yang melakukan atau mengikuti program pemberdayaan UMKM yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Regulator diberikan pada tahapan transformasi kemampuan dan pengayaan. Para pelaku UMKM diharuskan mengikuti pelatihan dan dibebaskan dalam berusaha, mereka bebas dalam menentukan usahanya sendiri. Tidak ada

pemaksaan untuk harus bergabung dengan pemerintah, bebas melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau berproduksi sendiri.

- Peran Pemerintah Sebagai Katalisator: Sebagai Katalisator, pada tahapan pengayaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menyiapkan sentra-sentra di seluruh Kota Surabaya untuk mengenalkan produk-produk hasil inovasi yang diproduksi oleh para pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Disperdagin pun mengirimkan surat melalui Wali Kota Surabaya untuk mengenalkan produk sandal hotel ke seluruh hotel di Surabaya. Dan bersinergi dengan toko roti Patata untuk menjadikan Souvenir, dan mengikutkan pameran-pameran UMKM.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukmito. 2008. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cohen, Bruce J. 2009. *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta: Bakrie School of Management
- Hurairah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo
- Lapera, Tim Work. 2001. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Maryati, Kun & Juju Suryawati. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Matthew, J.Miles. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan, dkk. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prijono, O.S dan A.M.W, Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies (CSIS)
- Ranoh, Ayub, 2006. *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis – Etis atas Kepemimpinan Soekarno*. Jakarta: Gunung Mulia
- Ruslan Malik dan W.M.K Anwari. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia
- Salam, Dharma Setiawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suyanto, Bagong & Sutinah (ed). 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Tambunan, Tulus. 2009 *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tjandra, Riawan. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, edisi 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ulber, Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unper Press.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Jurnal/Skripsi**
- Candra Arysta Putra Perdana, Tjahjanulin Domai, Suwondo. *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol 2,No.1, Universitas Brawijaya
- Nurhasanah Furqoni, Siti. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM dan Menengah di Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/23245>
- Solehah, Nurul. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Sektor Batik (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan)* *Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 6*
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/517>
- Hafsah, Muhammad Jafar (2004) *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. *Infokop Nomor 25 Tahun XX,2004*
<http://jurnal.smecca.com/index.php/infokop/article/download/60/57>
- Winarni, Endang Sri. 2006. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. *Jurnal Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia*. *Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006*.
<http://www.jurnal.smecca.com/index.php/infokop/article/download/204/202>
- Undang-undang:**
- UU RI NO. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, DAN Menengah*
- Peraturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah Pasal 43*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 18 Tahun 2010 *Pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan*
- Perda Nomor 7 tahun 1999, *tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila*
- Internet:**
- Soko Handinah: *Penutupan Lokalisasi Dolly dan Industri Seks*
<https://www.jurnalperempuan.org/blog/penutupan-lokalisasi-dolly-dan-industri-seks>

Dampak Sosial Penutupan lokalisasi Dolly
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-VI-13-I-P3DI-Juli-2014-10.pdf

http://www.republika.co.id/indeks/hot_topic/dolly_ditutup

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/20/oopmgn291-pemberdayaan-umkm-ubah-wajah-dolly>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Revitalisasi>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-risma-tutup-lokalisasi-gang-dolly-mati-matian.html>

Delivery, 2004, Pemberdayaan Masyarakat,
[/http://www.delivery.org/gudelines/policy/pg_3summary.htm](http://www.delivery.org/gudelines/policy/pg_3summary.htm)